

TERIMA KASIH
PAHLAWAN KESEHATAN
INDONESIA

Krisis
Pandemi

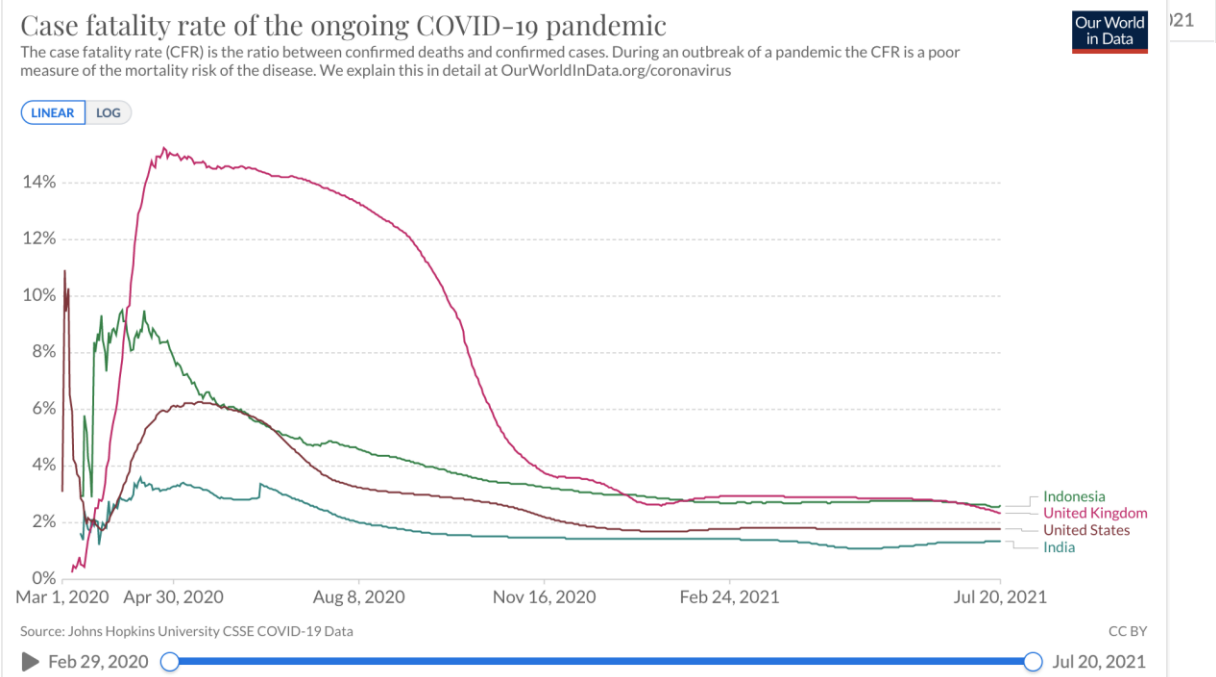
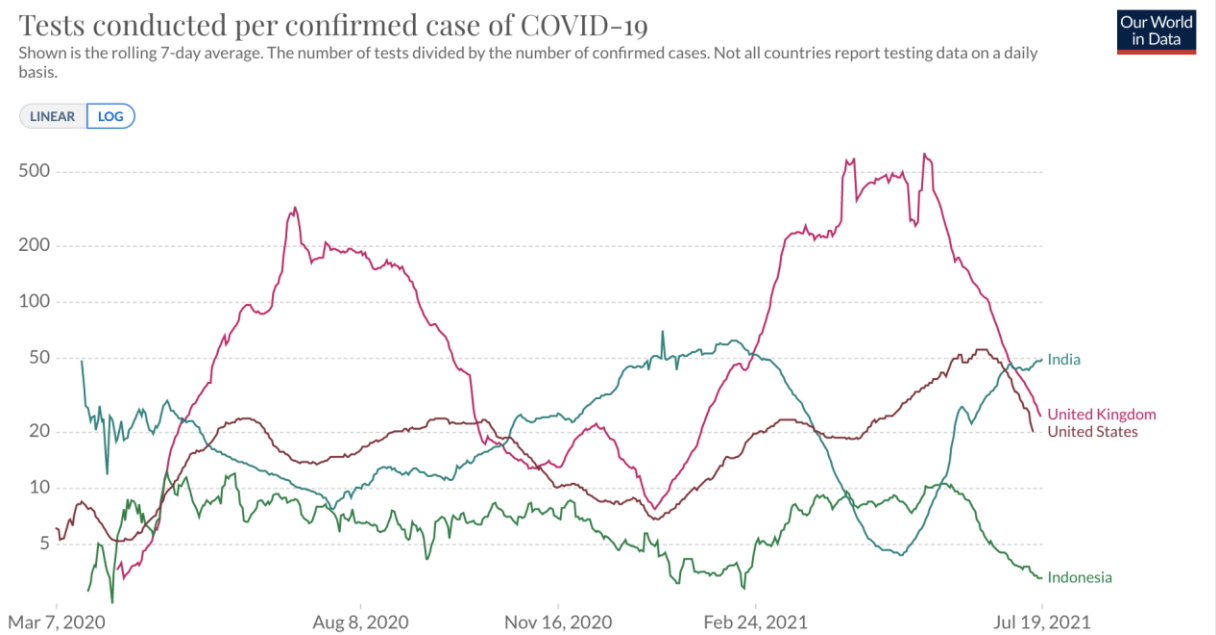
Irma Hidayana

LaporCovid-19

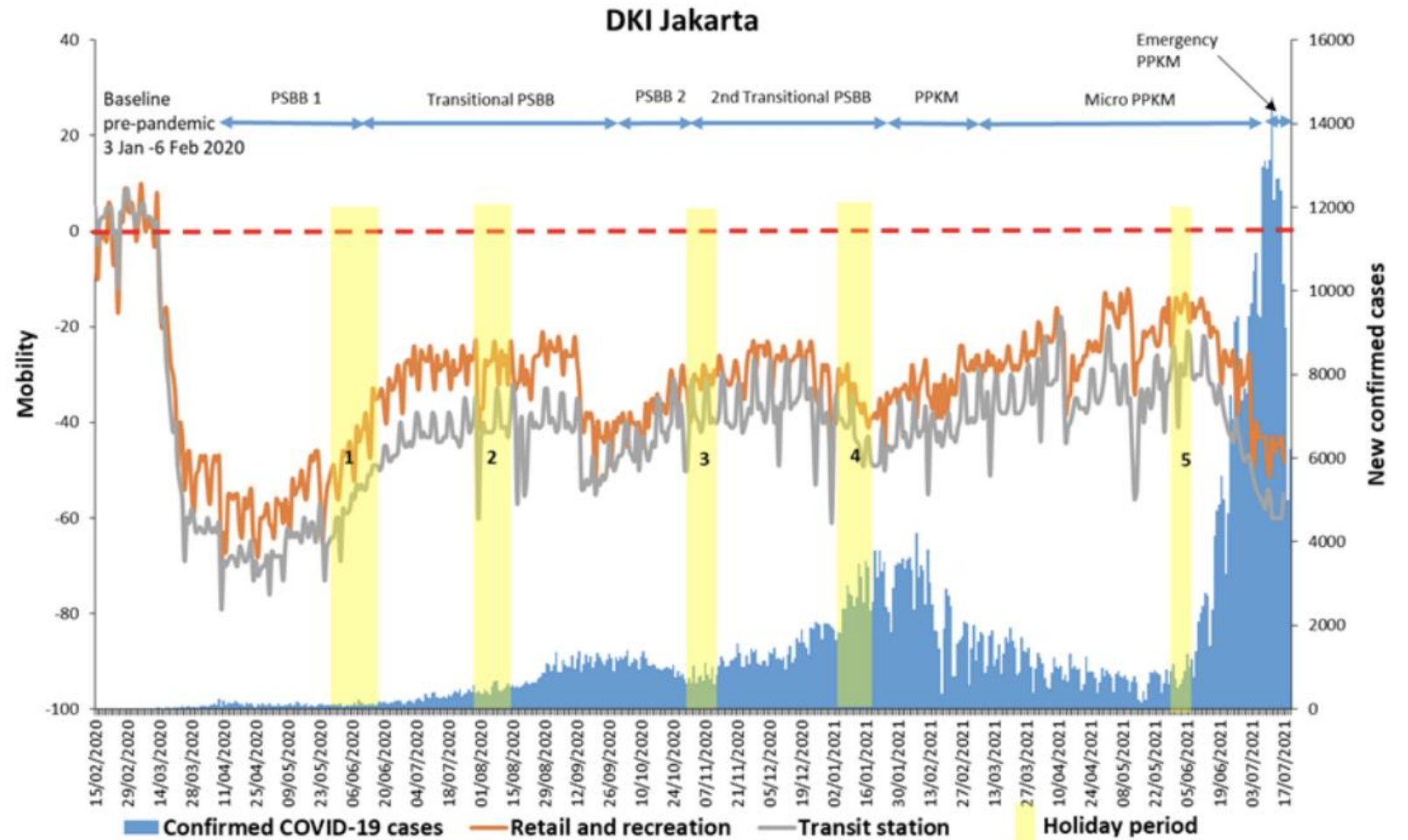


D. Jumlah orang yang diperiksa (per hari)

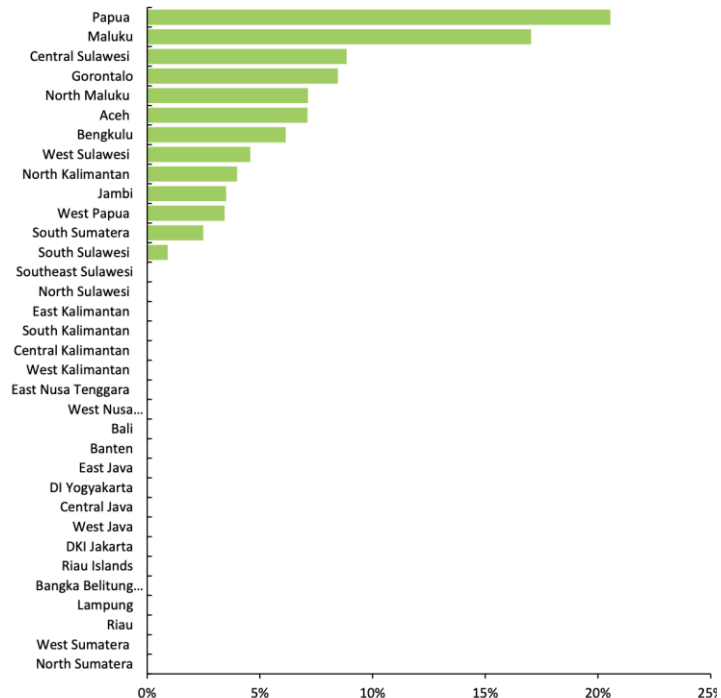
a. Jumlah orang yang diperiksa (per hari)		121.266 orang
RT-PCR		55.806 orang
TCM		560 orang
Antigen		64.900 orang
b. Orang positif (per hari)		28.228 orang
RT-PCR		21.082 orang
TCM		408 orang
Konfirmasi COVID-19 RDT Antigen		6.738 orang
c. Orang negatif (per hari)		93.038 orang
RT-PCR		34.724 orang
TCM		152 orang
Antigen		58.162 orang
Positivity Rate Orang Harian		23,28%
NAAT (RT-PCR dan TCM)		38,13%
Antigen		10,38%
Positivity Rate Orang Mingguan (18 - 24 Juli 2021)		26,64%
NAAT (RT-PCR dan TCM)		43,65%
Antigen		8,03%



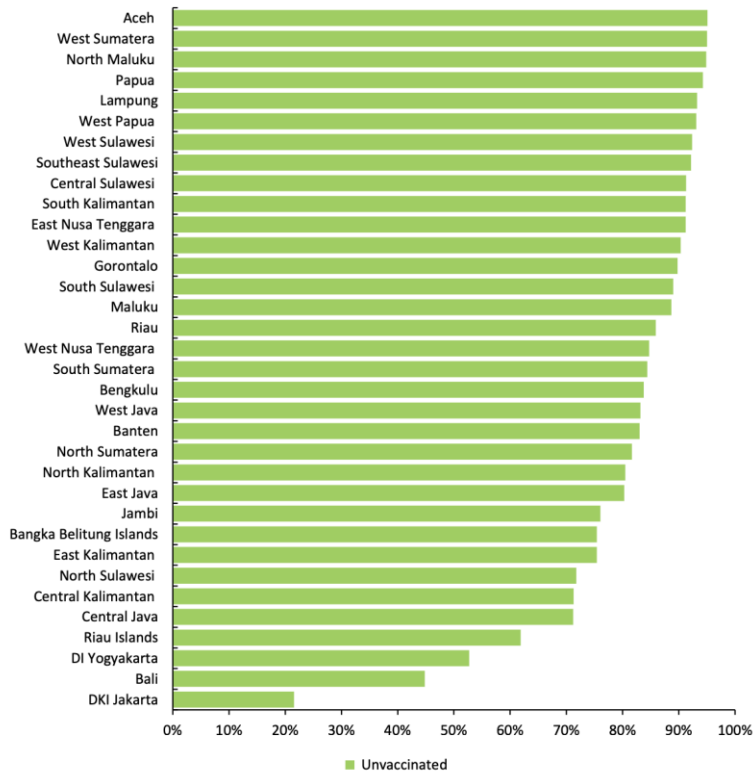
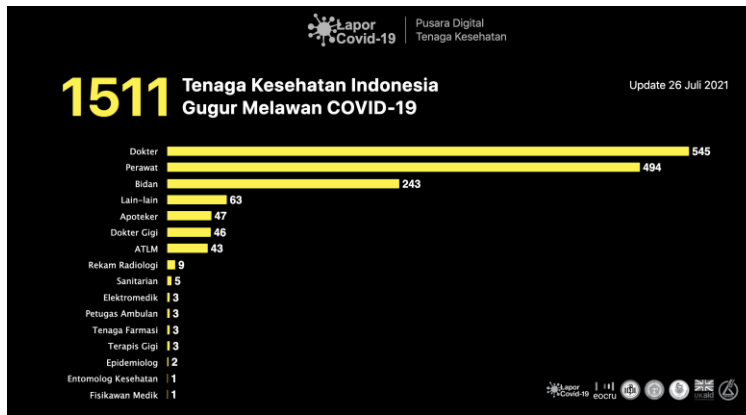
Analisa mobilitas di DKI Jakarta



Vaksin Gotong Royong Berbayar: Mengambil Untung di Tengah Pandemi



Nakes yang belum divaksin



Lansia yang belum divaksin

Vaksinasi Berbayar Dibatalkan, Daerah Masih Kekurangan Vaksin

Vaksin Berbayar Melanggar Etika Moral

Home > Internasional > Eropa Amerika

WHO Kritik Kebijakan Vaksin Berbayar Indonesia

CNN Indonesia | Kamis, 15/07/2021 15:12 WIB

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan," kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dikutip situs resmi WHO, Kamis (15/7).

Kemenkes Bantah LaporCovid-19: Tak Benar Faskes RI Kolaps Hadapi Pandemi

Farih Maulana Sidik - detikNews

Minggu, 04 Jul 2021 05:30 WIB



RS ISLAM SURABAYA & YANI

Assalamualaikum Wr. Wb.
Pelanggan yang terhormat, karena keterbatasan tempat perawatan dan tenaga kami maka

IGD RS Islam Surabaya - A. Yani

BELUM BISA MENERIMA RUJUKAN PASIEN COVID-19

Mulai tanggal 03 Juli 2021 sampai batas waktu yang akan kami sampaikan kembali.
Terimakasih atas perhatian dan pengertiannya.

+62318284505 - 07 RS Islam A Yani rsiyani rsiurabaya.com

Pelanggan yang Budiman, karena keterbatasan tenaga dan tempat perawatan, maka

IGD RS Islam Jemursari SEMENTARA TIDAK MENERIMA PASIEN COVID-19

PELAYANAN DIBUKA KEMBALI
Selasa, 6 Juli 2021
Pukul 08:00 WIB

Sebagai alternatif pelayanan, kami menyediakan
HEMOCARE WhatsApp 081-1354-8168
TELEMEDICINE WhatsApp 0895-3224-46500

www.rsisjs.id Rsi Jemursari Surabaya rsi.jemursari

RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
SIGAP (Smart, Islam, Gemma, Antusias, Profesional)

PENGUMUMAN

Mohon maaf dikarenakan penumpukan pasien maka IGD RS PKU Muhammadiyah Gamping **UNTUK SEMENTARA TIDAK MENERIMA PASIEN** mulai Selasa, 22 Juni 2021 pukul 19.00 WIB
BUKA KEMBALI Rabu, 23 Juni 2021 pukul 07.00 WIB

www.pkugamping.com
PKU Gamping pkugamping

RSUD KOTA BANDUNG

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan lonjakan jumlah kasus COVID-19 serta keterbatasan sarana prasarana maka untuk keselamatan pasien di RSUD Kota Bandung kami beritahukan bahwa :

PELAYANAN IGD KHUSUS COVID-19 DITUTUP

Terhitung mulai tanggal 2 Juli 2021 Pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan atau akan diinformasikan lebih lanjut

Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini

Note : Pelayanan IGD NON COVID-19 TETAP BERJALAN

Hotline : (022) 7800017 atau 085759291125

@RSKLBNDG rsudkotabandung.web.id rsudkotabandung rsudkotabandung@yahoo.co.id



Home Data Publikasi Program Tentang Kami



2670 Total Kematian Isolasi Mandiri dan Di Luar Rumah Sakit

Update 26 Juli 2021

Total Kematian Rekap LaporCovid-19	Total Kematian Rekap CSO/Komunitas*	Total Kematian Rekap Pemerintah Daerah**	Jumlah Provinsi Terlacak
1063	446	1161	17
Jumlah Kota/Kabupaten Terlacak			88

*Data CSO/Komunitas berasal dari lembaga CISDI.
**Data Pemerintah Daerah hanya berasal dari Dinkes DKI

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Selamat Hari HAM Sedunia

Kesehatan adalah bagian dari HAM. Hak Kesehatan dijamin oleh:

- Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) amandemen UUD 1945
- Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



KOMPAS.com

Cerita Warga Kalbar Antre Isi Tabung Oksigen, Ternyata Ibu Sudah Meninggal - ...

TEMPO.CO

Dapat Somasi soal Kelangkaan Oksigen, Kemenkes: Akan Jadi Perhatian

Dinkes: Bali krisis oksigen hingga lebih dari 70 ton perhari

© Jumat, 23 Juli 2021 18:43 WIB



Area Rentan Korupsi (Col & sogok menyogok)

PENGUMUMAN
Penyampaian Permohonan Maaf atas Permasalahan Produksi dan Distribusi IVERMAX12

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Harsen Laboratories terkait dengan Ivermax 12 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami Direksi PT. Harsen Laboratories memohon maaf yang sebesar besarnya kepada Badan POM RI, dimana dalam berbagai media masa Sdr Sofia Koswara, Iskandar Pumomo Hadi dan dr. Riyo Kristian Utomo yang menyebut diri masing-masing sebagai Vice President, Direktur Komunikasi dan Direktur Marketing PT. Harsen Laboratories, telah menggiring opini masyarakat untuk melakukan pengobatan Covid-19 sendiri, dan mengakibatkan masyarakat membeli Ivermax12 tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Selain itu, Pernyataan-pernyataan ketiganya di berbagai media massa telah merugikan integritas dan nama baik Badan POM RI.
2. Kami Direksi PT. Harsen Laboratories juga meminta maaf kepada Badan POM RI atas temuan kritikal yang ditemukan pada saat Badan POM RI melakukan inspeksi kepada fasilitas PT. Harsen Laboratories terkait produksi dan distribusi Ivermax12. Atas hal tersebut, dengan ini Badan POM RI telah memberikan sanksi kepada PT. Harsen Laboratories berupa Penghentian Sementara Kegiatan Fasilitas Produksi Ivermax12, dan Perintah Penarikan Kembali produk Ivermax12.
3. Atas temuan dan sanksi Badan POM RI kepada PT. Harsen Laboratories tersebut, kami telah melakukan Penghentian Sementara Terhadap Kegiatan Fasilitas Produksi Ivermax 12 dan secepatnya melakukan Penarikan Kembali produk Ivermax 12, selain itu kami telah membuat CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) dan akan menyelesaikan secara tuntas temuan tersebut serta secepatnya melaporkannya kepada Badan POM RI.
4. Kami PT. Harsen Laboratories berjanji akan melakukan perbaikan sesuai dengan saran konstruktif dari Badan POM RI termaksud. Untuk kedepannya kami akan berupaya secara konsisten dalam memproduksi dan mendistribusikan Ivermax 12 sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Cara-cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan Cara-cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB).
5. PT. Harsen Laboratories menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas informasi yang berlebihan (*over claim*) tentang produk Ivermax12 yang kami produksi dan distribusikan. Kami klarifikasi disini bahwa Izin Edar yang kami terima dari BPOM RI untuk Ivermax 12 adalah untuk pengobatan cacangan dan bahwa benar Ivermax12 adalah obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter.

Demikian pernyataan permohonan maaf ini kami sampaikan, atas perhatian dari semua pihak kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami:
PT. Harsen Laboratories

Haryoseno
Presiden Direktur

- Melibatkan industri – tenaga Kesehatan – fasilitas layanan Kesehatan - warga
- Kebutuhan layanan kesehatan terus ada (*inelastic demand*) (Vian 2002, 2007).
- Ketidakseimbangan relasi “kuasa” antara dokter, nakes, RS - pasien (Nilufur, 2003) Termasuk penentuan jenis obat/perawatan dsb. Dalam konteks Pandemi: otoritas-fasyankes-masyarakat
- Sentralisasi-desentralisasi kebijakan dan anggaran beserta pelaksanaan dan monitoringnya (UNDP 2003) - anggaran yang besar-
- Asuransi (BPJS, dan swasta), misal: perawatan medis yang berat, billing fraud.

Kesempatan monopoli pelayanan, diskresi membuat keputusan, akuntabilitas yang rendah, tidak transparan. Didukung lingkungan yang mendukung Tekanan akibat gaji kecil, kebutuhan keluarga besar (Vian, 2008).

Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild COVID-19

A Randomized Clinical Trial

Eduardo López-Medina, MD, MSc; Pío López, MD; Isabel C. Hurtado, MD; Diana M Dávalos, MD, MPH, DrPH; Oscar Ramirez, MD, MPhil; Ernesto Martínez, MD; Jesus A. Díazgranados, MD; José M. Oñate, MD; Hector Chavarriaga, MD, MS; Sócrates Herrera, MD; Beatriz Parra, PhD; Gerardo Libreros, PhD; Roberto Jaramillo, MD; Ana C. Avendaño, MD; Dilian F. Toro, MD; Miyerlandi Torres, DrPH; Maria C. Lesmes, MD; Carlos A. Rios, MD; Isabella Caicedo, MD

IMPORTANCE Ivermectin is widely prescribed as a potential treatment for COVID-19 despite uncertainty about its clinical benefit.

OBJECTIVE To determine whether ivermectin is an efficacious treatment for mild COVID-19.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS Double-blind, randomized trial conducted at a single site in Cali, Colombia. Potential study participants were identified by simple random sampling from the state's health department electronic database of patients with symptomatic, laboratory-confirmed COVID-19 during the study period. A total of 476 adult patients with mild disease and symptoms for 7 days or fewer (at home or hospitalized) were enrolled between July 15 and November 30, 2020, and followed up through December 21, 2020.

INTERVENTION Patients were randomized to receive ivermectin, 300 µg/kg of body weight per day for 5 days (n = 200) or placebo (n = 200).

MAIN OUTCOMES AND MEASURES Primary outcome was time to resolution of symptoms within a 21-day follow-up period. Solicited adverse events and serious adverse events were also collected.

RESULTS Among 400 patients who were randomized in the primary analysis population (median age, 37 years [interquartile range {IQR}, 29-48]; 231 women [58%]), 398 (99.5%) completed the trial. The median time to resolution of symptoms was 10 days (IQR, 9-13) in the ivermectin group compared with 12 days (IQR, 9-13) in the placebo group (hazard ratio for resolution of symptoms, 1.07 [95% CI, 0.87 to 1.32]; P = .53 by log-rank test). By day 21, 82% in the ivermectin group and 79% in the placebo group had resolved symptoms. The most common solicited adverse event was headache, reported by 104 patients (52%) given ivermectin and 111 (56%) who received placebo. The most common serious adverse event was multiorgan failure, occurring in 4 patients (2 in each group).

CONCLUSION AND RELEVANCE Among adults with mild COVID-19, a 5-day course of ivermectin, compared with placebo, did not significantly improve the time to resolution of symptoms. The findings do not support the use of ivermectin for treatment of mild COVID-19, although larger trials may be needed to understand the effects of ivermectin on other clinically relevant outcomes.

TRIAL REGISTRATION ClinicalTrials.gov Identifier: [NCT04405843](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04405843)

- + Visual Abstract
- + Supplemental content

Home > Nasional > Politik

DPR Soroti Kebakaran Kantor BPOM: Kecelakaan atau Kesengajaan

CNN Indonesia | Senin, 19/07/2021 09:07 WIB

Bagikan :  



sis penggunaan sebagai profilaksis dan treatment COVI

ncegahan

Hari ke-1 : 1 tablet 12 mg
 Hari ke-3 : 1 tablet 12 mg
 minum setiap bulan pada saat lambung kosong

ngobatan mild - moderate

Hari ke-1 : 1 tablet 12 mg
 Hari ke-3 : 1 tablet 12 mg
 Hari ke-5 : 1 tablet 12 mg
 minum pada saat lambung kosong

ngobatan severe

Hari ke-1 s/d ke-5 : 1 tablet 12 mg
 minum pada saat lambung kosong

nber : berdasarkan referensi EUA Slovakia



HOME > NASIONAL >

BPOM Keluarkan Aturan Penggunaan Obat pada Kondisi Darurat Termasuk Ivermectin

Reporter: [Antara](#)
 Editor: [Eko Ari Wibowo](#)

Rabu, 21 Juli 2021 17:26 WIB

0 KOMENTAR



Peran Kita?

- Mendorong transparansi dan pengelolaan Kesehatan di berbagai tingkat (pusat, daerah, RS dan fasyankes lainnya) demi meningkatkan status Kesehatan masyarakat. Perlunya membangun **narasi tanding bersama**
- Ikut mengawasi potensi *Col*, *abuse of power* dan bentuk peyalahgunaan kewenangan dan korupsi dalam pendiagnosaan, penentuan perawatan, dan pengobatan
- Mengumpulkan fakta, data, lalu memantik pertanyaan publik **Kampanye Populer**
- Berkolaborasi dengan media, saintis independent, sesama NGO, experts, dalam upaya mengungkap potensi *Col* dan korupsi.
- Menjadi “hub” untuk mengoneksikan aktor kemanusiaan dan aktikorupsi
 - Banyak saintis, akademisi, pakar yang memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang baik serta peka terhadap peluang dan kerentanan korupsi, konflik kepentingan dsb di bidangnya yang perlu dibantu mengamplifikasi apa yang selama ini belum mereka suarakan
 - Menghubungkan para pakar dengan aktivis atau pakar lainnya
- Menjalankan fungsi edukasi publik, termasuk **counternarasi**

Terima kasih